

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG TENTANG
RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA PANTAI PADANG DAN PEDAGANG
KAKI LIMA JEMBATAN SITI NURBAYA**

Tesis



Oleh

Pebriansyah Emrialdi

2320832003

Pembimbing

- 1. Dr. Tengku Rika Valentina, MA.**
- 2. Dr Indah Adi Putri, M.IP.**

MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Padang, khususnya di Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya, melalui peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, melarang berjualan di area yang dilarang seperti badan jalan dan fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses dan keberhasilan implementasi kebijakan relokasi di kedua lokasi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara komparatif implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di dua lokasi di Kota Padang Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya dengan menyoroti dampak ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata yang ditimbulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. model Van Meter dan Van Horn, enam variabel implementasi termasuk standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan disposisi pelaksana belum sepenuhnya terpenuhi dalam konteks ini. Temuan lapangan memperlihatkan adanya perbedaan antara kerangka teoritis dan realitas implementatif, khususnya di Pantai Padang, di mana tujuan penataan kawasan wisata tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pedagang. Secara ekonomi, relokasi menyebabkan penurunan pendapatan pedagang karena lokasi baru yang tidak strategis dan kurang mendukung. Secara social dan budaya, relokasi memicu perubahan karena ruang usaha lama telah menjadi bagian dari identitas dan relasi sosial komunitas. Dari sisi pariwisata, meskipun kawasan menjadi lebih tertib secara visual, vitalitas ekonomi dan budaya justru menurun akibat kurangnya integrasi antara kawasan relokasi dan atraksi wisata utama. Penelitian menunjukkan relokasi di Pantai Padang tidak berhasil karena lokasi baru kurang strategis, fasilitas terbatas, dan lemahnya pengawasan, sementara relokasi di Jembatan Siti Nurbaya relatif berhasil karena lokasi strategis, fasilitas memadai, komunikasi persuasif, dan pengawasan konsisten. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta kesesuaian kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Kota Padang, Relokasi Pedagang, Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya.

ABSTRACT

The implementation of street vendors' relocation policy in Padang City, particularly in Padang Beach and Siti Nurbaya Bridge, was carried out through Regional Regulation No. 11 of 2005 on Public Order, which prohibits trading in restricted areas such as roads and public facilities. This study aims to describe the process and outcomes of the relocation policy implementation in both locations. The focus of this research is a comparative analysis of the relocation policy implementation in Padang Beach and Siti Nurbaya Bridge, emphasizing its economic, social, cultural, and tourism impacts. A qualitative approach with a case study method was applied. Based on Van Meter and Van Horn's model, the six variables of implementation including policy standards, resources, communication, implementers' characteristics, social economic conditions, and implementers' disposition were not fully achieved in this context. Field findings reveal a gap between theoretical frameworks and practical implementation, particularly in Padang Beach, where the goal of developing a tourism area was not accompanied by improvements in vendors' welfare. Economically, relocation led to a decline in vendors' income due to the non-strategic and less supportive new location. Socially and culturally, relocation disrupted community dynamics since the previous trading area had become part of the vendors' identity and social relations. From a tourism perspective, while the area appeared more visually orderly, its economic and cultural vitality declined because the relocation site lacked integration with the main tourist attractions. The study concludes that relocation in Padang Beach was unsuccessful due to the non-strategic location, limited facilities, and weak monitoring, whereas relocation in Siti Nurbaya Bridge was relatively successful due to its strategic location, adequate facilities, persuasive communication, and consistent supervision. These findings highlight that the success of policy implementation depends on communication, resources, implementers' disposition, and the alignment of policy with the social economic realities of the community.

Keywords: Policy Implementation, Padang City Government, Relocation of Traders, Padang Beach and Siti Nurbaya Bridge